

BAB I

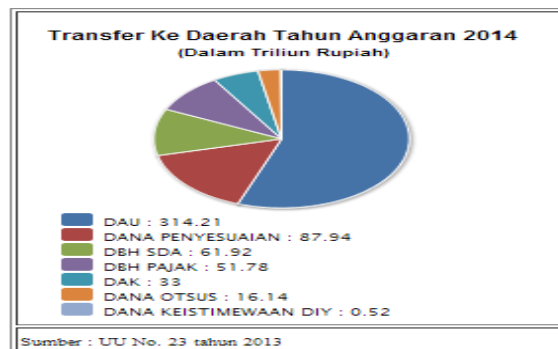
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Menurut UU RI Nomor 33 tahun 2004, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berikut ini data berupa persentase transfer dana dari pusat kepada daerah tahun anggaran 2014 (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>) :



Gambar 1.1

Transfer Dana kepada Daerah yang ada di Indonesia dengan TA 2014

Dari gambar 1.1 jumlah transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah paling banyak berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih variabel penelitian pada DAU bukan Dana Perimbangan atau DAK dan DBH. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU RI Nomor 32 tahun 2004).

Hasil penelitian Prakosa (2004) membuktikan bahwa dengan adanya DAU dan PAD akan mempengaruhi secara signifikan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah pada tahun bersangkutan baik dengan dan tanpa menggunakan *lag* serta terbukti telah terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2000-2002. Hasil penelitian Afrizawati (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Maimunah (2006) serta Mentayani dkk., (2012) juga

membuktikan bahwa DAU dan PAD secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya belanja daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Menurut Todaro (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja serta kemajuan teknologi. Hasil penelitian Maryati dan Endrawati (2010) membuktikan bahwa dengan adanya DAU dan PAD dapat mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Barat, akan tetapi hasil penelitian Santosa (2013) membuktikan bahwa dengan adanya DAU dan PAD tidak akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya perbedaan hasil penelitian ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.

Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat Pemerintahan Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintahan Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum

memperolehnya (Sukirno, 2008). Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan oleh daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi.

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mempunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Levitan (1980) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Keterkaitan antara ketenagakerjaan dan kemiskinan dapat dilihat dalam hal upaya untuk memperoleh pendapatan. Hasil penelitian Santosa (2013) membuktikan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan daerah di 33 Provinsi di Indonesia. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km² (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk hamper 4 juta jiwa. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Madura, selain itu untuk menuju pulau ini bisa dilalui dari jalur laut ataupun melalui jalur udara.

Untuk jalur laut, bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Selain itu juga bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumenep, ujung timur Madura. Pulau Madura terdiri dari empat Kabupaten/Kota yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pengembangan Wilayah Madura akan dilakukan dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur yang difokuskan di lima daerah termiskin di Jawa Timur dimana empat daerah diantaranya terdapat di Madura, selain itu akan dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan

(<http://www.iradiofm.com/informatif/i-fakta/220-ekonomi-jakarta/2756-pemerintah-anggarkan-rp-1-5-trilyun-untuk-infrastruktur-di-madura>).

Berdasarkan fakta tersebut, penting dilakukan penelitian mengapa daerah Madura masih tergolong miskin. Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura tergolong miskin bisa disebabkan oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor DAU dan PAD sebagai treatment untuk melihat apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura. Faktor DAU dan PAD juga digunakan peneliti untuk melihat bagaimana pengaruh nya terhadap belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura dengan menggunakan tahun penelitian mulai tahun 2002 s/d 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempertegas ruang lingkup dari penelitian ini dan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. apakah DAU berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura?
- b. apakah PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura?
- c. apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap prediksi belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura?
- d. apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/kota di Pulau Madura?
- e. apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap tingkat pengangguran daerah Kabupaten/kota di Pulau Madura?

- f. apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan daerah Kabupaten/kota di Pulau Madura?

1.3 Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya, maka penelitian ini dibatasi dengan menggunakan variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan di Pulau Madura sebagai variabel penelitian dengan periode 2002-2011.

1.4 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.
- b. untuk mengetahui bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.
- c. untuk mengetahui bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap prediksi belanja daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.
- d. mengetahui bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.
- e. mengetahui DAU dan PAD berpengaruh terhadap tingkat pengangguran daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.
- f. mengetahui bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura.

1.5 Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menggugah hati Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan pembangunan daerah di Pulau Madura dengan menambah transfer dana berupa DAU kepada Pemda Kabupaten/Kota di Pulau Madura, agar tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah di Pulau Madura bisa semakin menurun.

b. Bagi Pemerintahan Daerah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura untuk memanfaatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan dapat mengelola PAD dengan sangat bijak secara proporsional dan disajikan secara transparan kepada masyarakatnya sehingga daerah Kabupaten/Kota di Pulau Madura perekonomiannya menjadi lebih bertumbuh serta tingkat pengangguran dan kemiskinan daerahnya bisa semakin menurun.

c. Bagi Pembaca :

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi dan bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan (wawasan) khususnya tentang PAD, DAU, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan daerah di Pulau Madura.